

## **Dampak Kebijakan Sekolah Tentang Poin Pelanggaran Tata Tertib Siswa dalam Membentuk Perilaku Siswa yang Berkarakter**

**Muhammad Solihuddin**

Guru SMP Negeri 1 Kare Kabupaten Madiun

Email: so.li92@yahoo.co.id

**Abstract:** This study aims to: 1). models describe the implementation of school policies on student discipline infraction points 2). describing the constraints in the implementation of school policies on student discipline infraction points, 3). describing the efforts to overcome obstacles in implementing school policies on student discipline infraction points. 4). describe the impact of school policies on student discipline violations points in SMP 4 Mejayan. Researchers observed an existing policy using observations, interviews and document research. The results showed: 1). student discipline violation points is to use a points system violation, 2). Constraints in the implementation of student discipline include non-physical barriers and physical barriers to the school environment, 3). Efforts to overcome barriers to the implementation of the order of students is done by principal's conduct coaching teachers, staff, and all the elements that exist in the school, 4). the impact of school policies is the number of offenses committed students dropped dramatically, the behavior of the students have started to show the existence of such character behavior, discipline, respect for legal norms in force, responsible, healthy lifestyle

**Keywords:** character education, policy, points violation

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk: 1). mendeskripsikan model pelaksanaan kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran tata tertib siswa 2). mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran tata tertib siswa. 3). mendeskripsikan upaya-upaya mengatasi hambatan dalam melaksanakan kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran tata tertib siswa. 4). mendeskripsikan dampak kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran tata tertib siswa di SMPN 4 Mejayan. Peneliti mengobservasi suatu kebijakan yang telah ada dengan menggunakan pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). poin pelanggaran tata tertib siswa adalah dengan menggunakan sistem poin pelanggaran, 2). Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tata tertib siswa meliputi hambatan non fisik dan hambatan lingkungan fisik sekolah. 3). Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan tata tertib siswa dilakukan dengan cara kepala sekolah mengadakan pembinaan guru, karyawan, dan semua elemen yang ada di sekolah 4). dampak kebijakan sekolah adalah jumlah pelanggaran yang dilakukan siswa menurun drastis, perilaku siswa sudah mulai menunjukkan adanya perilaku yang berkarakter diantaranya, berdisiplin, menghormati norma-norma hukum yang berlaku, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat.

**Katakunci:** pendidikan karakter, kebijakan, poin pelanggaran

Sekolah adalah lembaga pendidikan untuk membentuk watak, kepribadian dan menimba ilmu siswa sehingga terbentuklah siswa yang berbudaya luhur. Disisi lain sekolah dipandang sebagai suatu masyarakat yang utuh dan bulat serta memiliki kepribadian sendiri, menjadi tempat untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar. Sekolah berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam arti menumbuhkan, memotivasi dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang mencakup etika, logika, estetika dan praktika sehingga tercipta manusia Indonesia yang utuh dan berakar pada budaya bangsa.

Menurut Heru Wibowo (2010) dalam kehidupan masyarakat yang semakin maju dan berkembang seperti sekarang ini persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat semakin kompleks, karena adanya perubahan-perubahan dalam berbagai kehidupan masyarakat. SMP Negeri 4 Mejayan berada ditengah-tengah masyarakat maka tata kehidupan yang berkembang dalam masyarakat ikut mewarnai gerak langkah sekolah, tingkat perekonomian, sosial, budaya dan agama yang dianutnya serta bidang kehidupan lain akan mempengaruhi kehidupan sekolah. Untuk itu sekolah

perlu membuat kebijakan tentang peraturan dan tata tertib yang berkaitan dengan pembentukan perilaku siswa sehingga pengaruh negatif dari luar dapat dihindari. Dengan adanya peraturan dan tata tertib sekolah yang baik dan disepakati oleh semua pihak, yaitu guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, komite sekolah, maka diharapkan kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan efektif.

Sebagaimana disebutkan diatas dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 didalamnya terkandung harapan-harapan yang sangat mulia yaitu terciptalah siswa yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang baik serta akhlak yang mulia, namun demikian dalam pelaksanaannya di SMP Negeri 4 Mejayan masih banyak penyimpangan-penyimpangan tingkah laku peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya siswa yang berperilaku tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab baik diluar sekolah maupun didalam lingkungan sekolah, pada jam-jam pelajaran masih sering terjadi siswa yang berkeliaran di jalanan (mbolos), masih sering terjadi perkelahian antar siswa, pemalakan pada siswa lain, tidak mengerjakan tugas dari guru, memakai baju tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, datang terlambat, tidak sopan kepada bapak ibu guru dan sebagainya.

Dengan menegakkan peraturan dan tata tertib sekolah, maka diharapkan akan terbentuk siswa-siswa yang disiplin dan bertanggung jawab, sehingga masalah pelanggaran-pelanggaran moral yang sering terjadi seperti datang terlambat, dikelas ramai, sering keluar sekolah pada waktu pelajaran tanpa ijin, merokok, dan sebagainya dapat ditekan seminim mungkin. Untuk mewujudkan semua itu, perlu adanya formula khusus agar tata tertib dapat dijalankan secara efektif dan efisien., dengan peraturan tata tertib yang baik dan sudah disetujui oleh semua elemen sekolah, juga dijalankan dengan benar, diharapkan dapat menciptakan situasi dan kondisi sekolah cukup kondusif. Situasi yang kondusif dapat membantu kegiatan belajar mengajar berlangsung tenang dan aman, sehingga siswa dapat mencapai prestasi yang optimal.

Kita mengetahui bahwa tiap kelompok kesatuan sosial sekecil apapun, keluarga, kelompok bermain, misalnya selalu mempunyai peraturan-peraturan tertentu, yang sedikit banyak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Adanya peraturan-peraturan itu antara lain adalah untuk menjamin kehidupan yang tertib dan tenang, hingga, kelangsungan hidup sosial itu dapat dicapai, kewajiban anggota baru bagi kelompok sosial adalah menyesuaikan diri terhadap peraturan-peraturan tersebut. Setiap pelanggaran akan mengakibatkan gangguan bagi anggota kelompok bahkan kehidupan seluruh kelompok(Sujanto: 1996).

Demikian pula halnya dengan kedatangan siswa di sekolah di sekolah ia menjadi anggota baru bagi masyarakat sekolah, barulah diketahui oleh siswa bahwa dalam kesatuan sosial tersebut terdapat peraturan dan tata tertib sekolah, yang berlaku baginya, dan bila ia tidak dapat menyesuaikan ia akan menjadi pengganggu tata tertib yang berarti ia melanggar tata tertib.

Peraturan tata tertib di sekolah selalu dilengkapi dengan sanksi-sanksi tertentu, yang berpuncak kepada pemberian hukuman. Pelanggaran-pelanggaran di dalam kelas dapat diberi sanksi langsung secara bertahap misalnya: diperingatkan, ditempatkan terpisah dari siswa lainnya, diberi tugas saat istirahat, dikeluarkan dari kelas(Bill Rogers dalam A.D. Rahayu Ratnaningsih: 2004).

### **Konsep Pendidikan Karakter**

Berdasarkan *grand design* yang dikembangkan Kemendiknas (2010), secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia(kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural(dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: Olah Hati(*Spiritual and emotional development*), Olah Pikir(*intellectual development*), Olah Raga dan Kinestetik(*Physical and kinesthetic development*), dan Olah Rasa dan Karsa (*Affective and Creativity development*).

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak”. Menurut Tadkiroatun Musfiroh(UNY, 2008), karakter mengacu kepada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi

(*motivations*), dan keterampilan (*skills*). Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia.

Lebih lanjut Tadkiroatun Musfiroh(UNY, 2008) mengungkapkan bahwa karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti *reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikiran positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif, tabah, terbuka, tertib*. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dirancang dengan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berangkat dari suatu masalah dalam kehidupan sosial masyarakat yang merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Masalah dalam kehidupan masyarakat selalu dinamis dan berubah mengikuti irama kehidupan dalam masyarakat tersebut.

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis akan menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian kualitatif ini, landasan teori akan difungsikan sebagai bekal untuk memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Sedangkan dalam pelaksanaannya dilapangan, peneliti melepaskan teori yang dimiliki, dan tidak akan digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrumen, wawancara dan observasi.

Agar penelitian dapat lebih obyektif, tepat sasaran fokusnya dan bermakna maka peneliti akan menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Disini peran peneliti hanya mendengar dan mencatat, yang bersifat “perspektif emic”, artinya memperoleh data bukan “sebagai makna seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan dan di pikirkan oleh sumber data.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Peneliti mengobservasi suatu kebijakan yang telah ada untuk diteliti yang fokusnya adalah sebagai berikut: 1) model pelaksanaan kebijakan yang dibuat sekolah tentang Poin Pelanggaran Tata Tertib Siswa; 2) hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sekolah tentang Poin Pelanggaran Tata Tertib Siswa; 3) upaya yang dilakukan sekolah dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sekolah; 4) dampak dari kebijakan yang dibuat sekolah tentang Poin Pelanggaran Tata Tertib Siswa.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan kepala sekolah, guru, siswa dan komite sekolah, penulis mengkaji bahwa:

#### **Model pelaksanaan kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran tata tertib siswa**

1. Menerbitkan Surat Keputusan Kepala SMPN 4 Mejayan Nomor: 421.3/105/402. 101. 156/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang tata tertib siswa tahun pelajaran 2011/2012. Dalam Keputusan Kepala Sekolah dijelaskan bahwa dalam satuan tugas lain dibentuk tim tata tertib yang semula tim tata tertib di sekolah tersebut tidak ada, sebagai upaya untuk membuat kondisi lingkungan belajar siswa dapat berlangsung kondusif, dalam upaya mendidik siswa agar lebih taat kepada ketentuan tata tertib sekolah yang pada akhirnya akan terbentuk perilaku siswa yang mencerminkan perilaku yang berkarakter bangsa. Pada akhir-akhir ini banyak sekali siswa yang melanggar tata tertib sekolah dan masih banyak perilaku siswa yang tidak

- mencerminkan budaya karakter bangsa.
2. Tim tata tertib menyusun tata tertib siswa yang di dalamnya mengatur hal masuk sekolah, kewajiban siswa, larangan bagi siswa, hal pakaian siswa, hak hak siswa, sanksi pelanggaran, dan lain- lain. Hal ini perlu diadakan untuk mempermudah petugas dalam mengamankan tata tertib siswa tersebut.
  3. Membuat kriteria ketentuan skor poin pelanggaran yang dilakukan siswa mulai dari 0 sampai dengan 100.
  4. Menyusun mekanisme penanganan pelanggaran tata tertib.
  5. Mensosialisasikan kepada siswa.
  6. Mendistribukan tugas dan wewenang guru dan karyawan dalam mengatasi pelanggaran siswa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 4 Mejayan Nomor: 421.3/106/402.101.156/2011 bahwa pembagian tugas guru dan karyawan berkaitan dengan penanganan pelanggaran tata tertib siswa adalah sebagai berikut: a). guru piket bertugas mendata atau mencatat siswa yang melanggar, memberikan pembinaan, member sanksi yang sifatnya spontan, mengantar siswa ke kelas; b). tim tata tertib menindak lanjuti data yang ada yaitu membina, membimbing, menginformasikan kepada orang tua dan menginformasikan kepada BK untuk diberikan konseling, melaporkan kepada Kepala Sekolah; c). tugas BK memberikan konseling kepada siswa setelah mendapat rujukan dari tim tata tertib dan d). tugas Kepala Sekolah selaku pengambil keputusan.

Sistem poin diharapkan dapat membentuk sikap siswa yang kurang disiplin menjadi disiplin, jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, patuh pada aturan-aturan sosial, santun, dan menghargai orang lain. Perubahan sikap ini diharapkan dapat menunjang proses belajar mengajar dengan situasi yang kondusif. dan nyaman diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

Peneliti juga menyimpulkan bahwa di SMPN 4 Mejayan, dalam upaya untuk membentuk perilaku siswa yang berkarakter melalui pemberian poin pelanggaran tata tertib siswa adalah sebagai bentuk usaha penyelenggaraan pendidikan karakter yang pengelolaannya melalui perencanaan, pelaksanaan, dan adanya pengendalian. Perencanaan pendidikan karakter di SMPN 4 Mejayan dimulai dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Sekolah nomor: 421.3/105/402.101.156/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang tata tertib siswa tahun pelajaran 2011/2012. Pelaksanaan pendidikan karakter siswa dikemas melalui pembuatan poin pelanggaran tata tertib siswa dan dikendalikan oleh tim tata tertib sekolah yang bekerja sesuai alur penanganan dan pemberian sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib yang sudah tertata sedemikian rupa. Budaya sekolah (pendidikan karakter) di SMPN 4 Mejayan ditata dan dikendalikan dengan diberlakukannya kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran tata tertib siswa dalam membentuk perilaku siswa yang berkarakter.

Keberhasilan pendidikan karakter di sekolah akan terlihat dalam perilaku keseharian peserta didik. Dengan kata lain, pendidikan karakter tidak dapat dilakukan di sekolah saja, namun diperlukan pembiasaan dan penerapan perilaku berkarakter di dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan sosialnya. Pelaksanaan kebijakan sekolah tentang pemberian poin pelanggaran tata tertib siswa dalam membentuk perilaku siswa yang berkarakter di SMPN 4 Mejayan sudah memiliki alur yang tertata sedemikian rupa, hal ini dinyatakan oleh pernyataan Urusan kesiswaan sebagai berikut.

*Apabila ada siswa yang melanggar siswa langsung ditangani oleh Tim Tata tertib, siswa menulis jenis pelanggaran serta menulis poinnya kemudian menjumlah sendiri poin yang siswa peroleh, dan bila perlu direkomendasikan ke Wali Kelas dan BP/BK*

Pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan poin pelanggaran tata tertib sekolah di SMPN 4 Mejayan mempunyai alur penanganan yang sudah tertata sedemikian rupa. Siswa yang melanggar diharuskan menulis jenis pelanggaran dan jumlah poin di data pelanggaran, kemudian ditindaklanjuti oleh tim tata tertib untuk menentukan jenis sanksi yang akan diberikan. Hal tersebut akan memudahkan kerja tim tata tertib sekolah sekaligus jika ada siswa yang belum memahami isi tata tertib sekolah dengan sendirinya akan segera paham, sebab siswa terlibat langsung dalam penulisan skor poin pelanggaran yang dilakukannya.

*Beberapa perbedaan sebelum dan sesudah poin pelanggaran tata tertib berlaku yaitu dulu belum teratur, anak akan diskorsing dan dikembalikan ke orangtua sekolah mengalami kesulitan karena tidak mempunyai bukti tertulis berupa catatan-catatan pelanggaran tapi sekarang semua pelanggaran tercatat sehingga bisa memberi sanksi hingga siswa dikeluarkan, sebelumnya yang ada hanya catatan ketidakhadiran siswa itupun hasil dari rekapan BP/BK.(Dra. Muftiati)*

Hasil wawancara dengan Urusan kesiswaan tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa sebelum ada poin tata tertib petugas atau guru tidak punya patokan untuk memberi sanksi sehingga mereka memberi sanksi yang berbeda-beda dan tidak terorganisasi. Tetapi setelah poin tata tertib berjalan dapat digunakan sebagai patokan atau rambu-rambu yang jelas dalam memberi sanksi kepada siswa.

Mekanisme penanganan siswa yang melanggar tata tertib sebagai alur penanganan siswa dimana siswa yang melanggar harus melapor jenis pelanggaran dan menulis poin ke guru piket kemudian oleh guru piket diberi sanksi kemudian diberi surat ijin masuk kelas. Dari situ tim tatib menindak lanjuti sesuai poin yang diperoleh siswa.

Mencermati mekanisme penanganan pelanggaran tata tertib di SMPN 4 Mejayan tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam menangani pelanggaran siswa sekolah menerapkan system poin dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. (1) Apabila ditemukan siswa yang melanggar tata tertib, baik oleh guru maupun petugas yang lain yaitu guru dan karyawan siswa wajib menghadap ke guru piket untuk menulis jenis pelanggaran dan jumlah poin, setelah itu siswa diberikan sanksi yang sifatnya mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan karakter bangsa diantaranya berpenampilan rapi, disiplin, giat belajar, belajar di perpustakaan, membersihkan lingkungan sekolah dan siswa diberi pengantar masuk ke kelas, (2) Dari poin yang diperoleh oleh tim tata tertib ditindaklanjuti sesuai prosedur penanganan yang berlaku diantaranya memberikan bimbingan, menginformasikan kepada BP guna diberikan bimbingan serta menginformasikan kepada orang tua, (3) Apabila dari bimbingan BK dan sanksi yang telah diberikan oleh tim tata tertib, poin sudah mendekati 100 proses penanganan melibatkan kepala sekolah selaku pengambil keputusan untuk dikembalikan ke orang tua.

### **Kendala Pelaksanaan**

Masih banyak siswa yang melanggar disebabkan kurangnya kepedulian sebagian guru dalam penanganan pelanggaran tersebut, sehingga pembentukan perilaku siswa yang berkarakter belum maksimal. Dilihat dari sisi kondisi fisik lingkungan sekolah, penulis mengkaji bahwa di SMPN 4 Mejayan perlu segera membangun pagar keliling, hal ini akan memudahkan tim tata tertib dalam melakukan pengawasan. Wawancara kepada beberapa elemen sekolah yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya, dengan demikian kesimpulan yang penulis ambil merupakan kondisi nyata di lapangan. Penulis mengadakan wawancara kepada Koordinator Tatib, Koordinator BK, guru dan siswa. Tujuannya adalah untuk mendapat informasi akurat tentang hambatan-hambatan yang di hadapi dalam melaksanakan kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran tata tertib siswa dalam membentuk perilaku siswa yang berkarakter di SMPN 4 Mejayan. Adapun sebagaian hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

*Masih ada guru yang kurang peduli terhadap kedisiplinan dan perilaku siswa, diantaranya siswa ketahuan melanggar tata tertib, misalnya berperilaku jorok, pulang sebelum waktunya serta pelanggaran kelengkapan seragam tidak semua guru menginformasikan ke tim tatib. Sehingga masih banyak siswa yang melanggar tatib dan belum mendapat penangan secara langsung pada saat kejadian. Disamping itu masih banyak siswa yang mendapat poin pelanggaran di atas 40. Semua penanganan tertumpu pada Tim Tatib, sedang jumlah tim tatib hanya 5 orang.*

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam menangani pelanggaran tersebut masih ada kendala bahwa masih banyak siswa yang melanggar disebabkan kurangnya kepedulian sebagian guru dalam penanganan pelanggaran tersebut, sehingga pembentukan perilaku siswa yang berkarakter belum maksimal.

Upaya sekolah dalam membentuk perilaku siswa agar menjadi siswa yang berkarakter belum maksimal, hal tersebut bukan semata kesalahan dan kelemahan usaha yang dilakukan di sekolah, akan tetapi ada berbagai factor lain yang berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya pembentukan dan pengembangan karakter siswa. Di samping manajemen sekolah, guru, karyawan, dan anggaran yang belum memadai, tak kalah pentingnya adalah factor gaya hidup, keluarga, dan masyarakat.

Gaya hidup modern sekarang ini, yang disokong oleh kapitalisme gaya hidup hedonism senantiasa menyerbu lewat televisi, media, dan iklan telah membuat para siswa bahkan masyarakat pada umumnya memilih jalan pintas, kehilangan jati diri, tidak saling menghargai, berperilaku ala barat, dan kehilangan akal sehat dan menyebabkan lemahnya perilaku yang mencerminkan karakter bangsa.

Demikian juga kebanyakan orang tua cenderung menyerahkan anak sepenuhnya pada sekolah, pada hal kemampuan sekolah sangat terbatas. Partisipasi dan dukungan keluarga dan masyarakat dalam proses membentuk perilaku siswa yang berkarakter masih sangat kurang. Wawancara dengan koordinator BP/BK SMPN 4 Mejayan adalah sebagai berikut.

*Dengan adanya tim tata tertib sekolah akan lebih memudahkan BP/BK dekat dengan siswa dimana selama ini BP/BK yang sebelumnya selalu yang menangani siswa termasuk kaitannya dengan kedisiplinan siswa sehingga kesan siswa terhadap BP/BK selalu mengurus pelanggaran akan dihilangkan.*

Dari cuplikan wawancara di atas penulis dapat mengkaji bahwa BP/BK di SMPN 4 Mejayan tidak menangani langsung terhadap pelanggaran tata tertib siswa, tetapi sebagai konselor dimana siswa diharapkan mendapat bantuan bimbingan yang menyenangkan siswa. Kesan Polisi sekolah yang selama ini dikenal siswa akan hilang. Di dalam bimbingannya BP/BK membimbing siswa yang melakukan pelanggaran agar siswa dapat berperilaku yang mencerminkan budaya karakter bangsa.

*Di SMPN 4 Mejayan, penanganan semua pelanggaran siswa langsung ditangani oleh tim tata tertib sekolah. Yang mana setiap siswa melanggar harus menulis jenis pelanggaran dan jumlah poin di format penanganan pelanggaran tata tertib. Disini siswa akan langsung mengetahui berapa jumlah poin yang diperoleh sehingga tahu seharusnya sanksi apa yang harus mereka terima. BP akan menerima rekom dari tim Tata Tertib untuk menindaklanjuti penanganan sesuai dengan tugas BP sebagai konselor.*

Dari pernyataan tersebut di atas dapat penulis kaji bahwa penanganan pelanggaran siswa langsung dipegang oleh tim tata tertib sekolah, sedangkan tugas BP/BK lebih mengutamakan bimbingan dan konseling agar siswa berperilaku sesuai dengan karakter bangsa daripada menangani langsung terhadap pelanggaran tata tertib siswa. BP tidak memberikan sanksi terhadap siswa yang melanggar tata tertib.

*Tim tata tertib sekolah, selama ini belum memberikan rekomendasi atau melaporkan siswa yang telah memperoleh poin pelanggaran. Siswa yang melanggar selalu langsung diberikan sanksi oleh tim tata tertib sekolah, yang seharusnya setiap pelanggaran selalu dilaporkan ke BP/BK supaya kami bisa langsung memberikan solusi dan membimbing siswa agar terbentuk perilaku siswa yang berkarakter. Kami sering memberikan bimbingan pada siswa yang melanggar tata tertib setelah kejadiannya berselang beberapa hari, sehingga pada saat memberikan bimbingan suasananya menjadi kurang tepat.*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat penulis kaji bahwa proses penanganan pelanggaran siswa di SMPN 4 Mejayan masih dimonopoli oleh tim tata tertib sekolah. Yang seharusnya BP di beri informasi tetapi selama dibentuknya tim tata tertib BP tidak diberi informasi siswa- siswa mana yang perlu konseling guna membantu memecahkan masalah.

Penulis menyimpulkan bahwa alur penanganan pelanggaran tata tertib siswa di SMPN 4 Mejayan sudah runtut dan tertata sedemikian rupa yaitu: (1) Apabila ditemukan siswa yang melanggar tata tertib, baik oleh guru maupun petugas yang lain yaitu guru dan karyawan siswa wajib menghadap ke guru piket untuk menulis jenis pelanggaran dan jumlah poin, setelah itu

siswa diberikan sanksi yang sifatnya mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan karakter bangsa diantaranya berpenampilan rapi, disiplin, giat belajar, belajar di perpustakaan, membersihkan lingkungan sekolah dan siswa diberi pengantar masuk ke kelas, (2) Dari poin yang diperoleh oleh tim tata tertib ditindaklanjuti sesuai prosedur penanganan yang berlaku diantaranya memberikan bimbingan, menginformasikan kepada BP guna diberikan bimbingan serta menginformasikan kepada orang tua, (3) Apabila dari bimbingan BK dan sanksi yang telah diberikan oleh tim tata tertib, poin sudah mendekati 100 proses penanganan melibatkan kepala sekolah selaku pengambil keputusan untuk dikembalikan ke orangtua.

Berdasarkan wawancara dengan guru BP penulis juga menyimpulkan bahwa meskipun sudah ada alur penanganan pelanggaran tata tertib siswa, namun dalam pelaksanaannya terkendala tim tata tertib, guru dan BP belum bisa berkoordinasi dan komunikasi secara optimal. Hal tersebut menyebabkan proses penanganan pelanggaran tata tertib siswa masih belum sinkron dan belum sepaham sehingga pembentukan perilaku siswa yang berkarakter juga akan terhambat.

### **Pelanggaran-pelanggaran yang sering muncul**

Kondisi pelanggaran di SMPN 4 Mejiyan terlihat justru di dalam kelas atau di lingkungan sekolah saat lepas dari pantauan tim tata tertib, banyak siswa yang memakai seragam yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, baju tidak dimasukkan. Dalam menyikapi tersebut sekolah atau tim tata tertib selalu mengadakan pemeriksaan mendadak di kelas-kelas. Dari hasil observasi penulis dapat menyimpulkan bahwa tim tata tertib hanya lima orang sehingga dalam menangani masalah sering tidak tuntas. Semestinya tim tata tertib bisa beranggotakan sejumlah kelas yang ada, sehingga masing-masing anggota tim tata tertib memiliki satu kelas kapling binaan dan hal tersebut juga akan memperingan tugas tim.

### **Dampak diberlakukannya poin pelanggaran tata tertib di sekolah,**

Meskipun masih banyak siswa yang melakukan pelanggaran akan tetapi pelanggaran yang dilakukan kebanyakan pelanggaran dengan sanksi ringan sebanyak 23 anak, pelanggaran dengan sanksi sedang sebanyak 9 anak, sedangkan pelanggaran dengan sanksi berat selama kebijakan diberlakukan belum pernah ada siswa yang melakukannya. Peneliti mengkaji bahwa jumlah siswa yang melakukan pelanggaran relatif kecil, hanya 32 siswa dari jumlah 554 siswa, bahkan tidak ada siswa yang melakukan pelanggaran berat. Hal ini menunjukkan kebijakan poin pelanggaran tata tertib siswa di SMPN 4 Mejiyan berdampak pada berkurangnya siswa yang melakukan pelanggaran. Penulis mengadakan wawancara dengan kepala SMPN 4 Mejiyan sebagai berikut.

*Memang masih belum maksimal hasilnya sebab sesuai dengan laporan tim tata tertib sekolah masih banyak siswa yang melanggar atau memperoleh poin diatas 40, meskipun begitu hal tersebut sudah mengurangi perilaku siswa yang sebelumnya sering membolos, seragamnya tidak sesuai dengan ketentuan sekolah dan sudah mengurangi keterlambatan siswa pada jam pertama masuk.*

Dalam wawancara, kepala SMPN 4 Mejiyan juga menyebutkan data tentang dampak diberlakukannya poin pelanggaran tata tertib di sekolah, meskipun masih banyak siswa yang melakukan pelanggaran akan tetapi pelanggaran yang dilakukan kebanyakan pelanggaran dengan sanksi ringan sebanyak 23 anak, pelanggaran dengan sanksi sedang sebanyak 9 anak, sedangkan pelanggaran dengan sanksi berat selama kebijakan diberlakukan belum pernah ada siswa yang melakukannya. Peneliti menyimpulkan bahwa jumlah siswa yang melakukan pelanggaran relatif kecil, hanya 32 siswa dari jumlah 554 siswa, bahkan tidak ada siswa yang melakukan pelanggaran berat. Hal ini menunjukkan kebijakan poin pelanggaran tata tertib siswa di SMPN 4 Mejiyan berdampak pada berkurangnya siswa yang melakukan pelanggaran. Peneliti mengadakan wawancara dengan ketua komite sekolah sebagai berikut.

*Saya sudah merasakan adanya disiplin pada diri anak, hal ini ditunjukkan searang anak-anak bangunnya lebih pagi dari biasanya, karena takut terlambat. Jika terlambat siswa akan mendapat pembinaan BP dan jika melakukan pelanggaran lebih banyak siswa malu jika orang tuanya di panggil sekolah.*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa guru sebagai berikut.

*Setelah diberlakukannya poin pelanggaran tata tertib di SMPN 4 Mejayan ini, sebagian besar siswa sudah mengalami perubahan tingkah laku, yang semula pakai baju asal-asalan sekarang sudah terlihat rapi dan bersih, kalau dulu sering terjadi siswa merokok di kantin depan sekarang sudah tidak ada, sebab dalam tata tertib skor anak merokok ini besar sekali yaitu 50.*

*Dampak dilaksanakan tata tertib siswa di sekolah ini, menjadikan lingkungan sekolah menjadi bersih, dulu dinding sekolah sebelah belakang sering dicorat-coret siswa dengan kalimat-kalimat yang jorok sekarang sudah bersih dan nyaman untuk dipandang.*

Wawancara dengan sebagian siswa berkaitan dengan dampak pelaksanaan poin pelanggaran tata tertib siswa di SPN 4 Mejayan adalah sebagai berikut.

*Temannya sekarang pada takut jika datang terlambat, sebab skor melanggarnya lima. Jika setiap hari terlambat, dalam satu bulan bisa mendapat skor 100 lebih, makanya sekarang ya harus berusaha berangkat pagi apalagi yang rumahnya jauh dari sekolah.*

*Dulu sering terjadi kerusakan sepeda, karena banyak siswa yang nongkrong di tempat parkir bahkan ada yang usil gembosi ban sepeda teman yang tidak disukainya, tetapi sekarang siswa dilarang bermain di tempat parkir sepeda, sehingga sudah tidak ada siswa yang berani usil mau merusak sepeda temannya.)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala SMPN 4 Mejayan, komite sekolah, guru, dan siswa penulis dapat mengkaji bahwa penerapan kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran tata tertib siswa dalam membentuk perilaku siswa yang berkarakter di SMPN 4 Mejayan sudah mulai nampak ada hasilnya diantaranya jumlah siswa yang membolos sudah turun drastis, siswa sudah mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah sadar dan menghormati norma-norma hukum yang berlaku. Jumlah siswa yang terlambat juga sudah menurun drastis, hal ini menunjukkan bahwa perilaku disiplin siswa sudah terbentuk. Aksi corat-coret siswa dan kebiasaan usil siswa merusak atau menggembosi ban sepeda temannya juga sudah tidak terjadi, hal ini menunjukkan bahwa penerapan poin tata tertib di SMPN 4 Mejayan berdampak pada kebiasaan berperilaku yang baik bagi siswa.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Model pelaksanaan kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran tata tertib siswa adalah dengan menggunakan sistem skor atau poin pelanggaran yang disusun oleh tim tata tertib sekolah. 2). Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tata tertib siswa meliputi hambatan non fisik dan hambatan lingkungan fisik sekolah. 3). Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan tata tertib siswa dilakukan dengan cara kepala sekolah mengadakan pembinaan guru, karyawan, dan semua elemen yang ada di sekolah agar ikut peduli dan mendukung program sekolah dalam membentuk perilaku siswa yang berkarakter, memotivasi tim tata tertib agar dapat melaksanakan tugas secara optimal, dan memprioritaskan pembangunan fisik pagar keliling untuk memudahkan tim tata tertib sekolah melakukan pemantauan. 4). Dampak kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran tata tertib siswa dalam membentuk perilaku siswa yang berkarakter adalah jumlah pelanggaran yang dilakukan siswa menurun drastis, perilaku siswa sudah mulai menunjukkan adanya perilaku yang berkarakter diantaranya, berdisiplin, menghormati norma-norma hukum yang berlaku, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, rapi dalam berpakaian, tepat waktu, santun, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, dan giat belajar

## **Saran**

1. Tim tata tertib, guru, guru BP/BK dan wali kelas hendaknya saling membantu dan saling mendukung agar kebijakan sekolah dapat dilaksanakan secara maksimal. Pada kurun waktu tertentu perlu duduk bersama untuk mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sekolah.



2. Kepala sekolah, guru, dan karyawan hendaknya berperilaku yang baik, hal ini merupakan pendidikan karakter yang tidak tertulis dalam tata tertib, namun akan memudahkan dan mempercepat terbentuknya perilaku siswa yang berkarakter.
3. Segala sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan pendidikan karakter hendaknya menjadi prioritas dalam pengadaannya.

### **Daftar Pustaka**

- A.D.Rahayu Ratna Ningsih (2004) *Pemulihan Perilaku*, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia Jakarta.
- Agus Sujanto (1996) *Psikologi Perkembangan*, Rineka Cipta Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pembinaan SMP(2010), *Pendidikan Karakter Bangsa*
- Heru, Wibowo. (2010). *Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Pelanggaran Tata tertib Siswa di SMA Negeri 1 Plaosan*
- Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional